

MODAL SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN DESA

Mita Rosaliza

Dosen Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

mita.rosaliza@gmail.com

Abstract

In the concept of Nawa Cita, “developing village and urban,” ex transmigration village has important role as initiator in developing economic area and it is expected to be able to create relation (bridging) and contribute in the development of surrounding areas. This research is triggered by that idea, so its aims are to describe : how can the social capital push the development of the area through the perspective of ex transmigration village and local village (bonding)?, how is the bridging- linking pattern created between ex transmigration village and local village, how is linking created institutionally between ex transmigration village and local and central governments. This research conducts qualitative and simple quantitative analysis with the case study of 104 villages (24 ex. Transmigration villages, 80 local villages) in Pelalawan Regency, Riau Province. This research uses potential data and level of village development and level of village poverty and strengthened by related researches and later it is analyzed in descriptive analysis. The result shows that ex transmigration villages develop well, better then local village due to the existence of strong social capital bonding. In other side, the development of village area of ex transmigration village is enclaved and the bridging with the local village is not created, which leads to imbalance development between ex transmigration program which brings ex-transmigration village having better competitive ability.

Keywords : Social and cultural capital, Ex transmigration village, Local village, development of village area.

I. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang transformasi desa semakin relevan dengan diterbitkannya Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Kedepannya, desa secara kewilayahan mempunyai peran penting sebagai basis awal

pembangunan. Secara ekonomi kelembagaan, keberadaan desa dengan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya diharapkan mampu membangun suatu masyarakat produktif yang menghasilkan suatu sistem yang baik kemudian secara bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan.¹ Data empiris menunjukkan pembangunan wilayah pedesaan akan berkaitan langsung dengan 176 juta penduduk atau sekitar 70 % jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di lebih 79 ribu desa.²

Pada era pemerintahan Joko Widodo, pembangunan wilayah desa merupakan salah satu program prioritas dari Nawa Cita ke-6, yang dimuat didalam RPJMN 2015-2019, yakni : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Melalui Kementerian Desa, Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pemerintah mempunyai target agar tingkat pembangunan desa dapat berkembang dari kelas swadaya, swakarya menuju swasembada. Hasil dari Statistik Potensi Desa pada tahun 2014 tingkat perkembangan desa

didominasi oleh 73,22 % desa swadaya, 25,91 % desa swakarya dan hanya 0,86 % desa swasembada³. Hal ini berarti secara umum desa-desa di Indonesia secara kewilayahan merupakan desa tertinggal yang belum mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal.

Ivanovic melalui penelitiannya menemukan bahwasanya desa eks kawasan Unit Pengembangan Transmigrasi (UPT) mampu bertransformasi menjadi desa swasembada sedangkan desa lokal cenderung statis. Temuan penelitian ini sejalan dengan fakta bahwasanya program transmigrasi telah ikut menunjang pembangunan daerah melalui pembangunan perdesaan baru. Dari 3.053 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), 1.183 diantaranya telah berkembang menjadi desa baru yang definitif. Desa-desa baru tersebut tumbuh dan berkembang menjadi ibukota kecamatan dan bahkan menjadi ibukota kabupaten/kota.⁴

Adanya kontribusi positif dari pelaksanaan program transmigrasi ini menjadi dasar pemerintah untuk mengintegrasikan konsep pembangunan desa melalui program

¹ Prof. Dr. Didik J. Rachbini dalam bukunya Ekonomi Kelembagaan. INDEF

² Ivanovich Augusta dalam tulisan penelitiannya Transformasi Desa Indonesia 2003-2035

³ Hasil Data Potensi Desa, Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa

⁴ Transmigrasi hanya ada di Indonesia. Direktorat Jendral Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

transmigrasi sebagaimana semangat Nawa Cita dengan berbasis modal sosial.⁵

Dalam perspektif pelaksanaan transmigrasi sebagai satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal yang khas Indonesia, nilai kebersamaan dan kekerabatan para transmigran merupakan modal sosial yang mampu mendorong pengembangan wilayah. Pada konsep Nawa Cita “membangun dari desa dan pinggiran,” desa eks transmigrasi berperan sebagai inisiator pengembangan ekonomi wilayah dan diharapkan mampu membangun hubungan (*bridging*) serta memberikan kontribusi pada pengembangan wilayah sekitarnya.

Disisi lain, Samuel Bazi, dkk dan Junaidi (2012)⁶ dari hasil penelitiannya menemukan bahwa desa/kawasan eks transmigrasi cenderung tumbuh sebagai kawasan *enclave* yang cenderung berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk namun memberikan kontribusi yang rendah terhadap pengembangan wilayah sekitarnya (desa lokal) dan kesejahteraan masyarakat tempatan.

Dalam tatanan konsep modal sosial, perbedaan tingkat kemajuan masyarakat sangat bergantung pada entitas modal sosial yang dibangun selain modal alam, manusia dan finansial. Jika dilihat dari perspektif desa eks transmigrasi dan desa lokal, perbedaan tingkat pembangunan yang ada menunjukkan bahwa terjadi perbedaan modal sosial yang terbentuk sebagaimana jika dicontohkan dalam skala yang lebih luas terjadi pada Italia Utara dan Italia Selatan ataupun Indonesia Barat dan Indonesia Timur.⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas, tentunya menarik untuk dikaji (1) Bagaimana modal sosial mampu mendorong pembangunan wilayah desa melalui perspektif desa eks transmigrasi dan desa lokal (*bonding*) (2) Bagaimana pola *bridging-linking* yang terbangun antara desa eks transmigrasi dan desa lokal. (3) Bagaimana *linking* yang terbangun secara kelembagaan antara desa eks transmigrasi ataupun desa lokal dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

II. KONSEP

II.a Modal Sosial dan Pembangunan Desa

⁵ Aditiasari, Dana . (2015). *Ini Tantangan Program Transmigrasi Jokowi*. Artikel Berita pada www.detikfinance.com 27 April 2015 diakses pada 21 Maret 2016.

⁶ Samuel Bazi, dkk dalam penelitiannya *Skill Transferability, Migration and Development : Evidence from Population Resettlement in Indonesia* dan Junaidi dalam penelitiannya *Analisis Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi*

⁷ Ibid.2

Didik J. Rachbini⁸ secara sederhana menjelaskan konsep modal sosial sebagai jaringan dari relasi sosial yang bercirikan norma kepercayaan, gotong royong dan azas repositas. Robert D. Putnam⁹ menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (*trust*), aturan-aturan (*norms*) dan jaringan-jaringan kerja (*networks*) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkordinasi. Konsep modal sosial dalam pandangan jaringan (*network view*) terlihat dari ikatan sosial yang terbentuk. Konsep ini melihat ikatan sosial *bonding*, *bridging* dan *linking* yang berguna untuk menggambarkan hubungan antara individu atau tingkat komunitas baik horizontal maupun vertikal.

Dikutip dari Sofyan Yamin & Teguh Dartant, Woolcock¹⁰ mengungkapkan bahwa modal sosial *bonding* merujuk pada hubungan antar individu yang berada dalam kelompok atau lingkungan ketetanggaan yang saling berdekatan dengan sifat kohesi internal yang kuat dan dibangun atas dasar *trust* dan

reciprocity. Ikatan ini berguna ketika krisis dan sebagai *social support* yang dibangun oleh kesamaan *socio-financial* dan demografik dengan komposisi masyarakat yang relatif homogen. Briggs (1998) mencatat bahwa pertukaran informasi dalam ikatan ini cenderung terbatas.

Modal sosial *bridging* adalah hubungan yang terjalin di antara karakteristik individu-individu yang berbeda, termasuk pula orang-orang dari komunitas, budaya, agama atau latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda. Andrian¹¹ menggambarkan modal sosial *bridging* sebagai jembatan yang menghubungkan antara kelompok ikatan *bonding*. Karakteristik masyarakat dalam modal sosial *bridging* cenderung bersifat heterogen dengan ikatan yang lemah. Akan tetapi Briggs (1998) memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih luas yang berguna untuk menolong individu atau komunitas lebih maju.

Sedangkan modal sosial *linking* merujuk kepada ikatan sosial antara individu atau komunitas dengan individu

⁸ Rachbini, Didik J. (2015). *Ekonomi Kelembagaan*. INDEF. Cetakan Kedua Juli 2015.

Rustiadi, Ernani, dkk. 2012. *Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Era Otonomi Daerah (Kajian Khusus Interaksi Pemukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya)*. Jurnal Visi Publik.

⁹ Robert D. Putnam, *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*, "The American Prospect" No 13 Spring

¹⁰ Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). *Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy*. The World Bank Research Observer, vol. 15, no. 2, pp. 225-49.

¹¹ Andriani, L. (2013). *Social Capital: a Road Map of Theoretical Frameworks and Empirical Limitations*. Working Papers in Management, Department of Management Birkbeck University of London, ISSN 2052 - 0581.

atau komunitas lainnya secara politis dengan kekuasaan. Woolcock dan Narayan (2000)¹² dan World Bank (2001) menyebut bahwa modal sosial *linking* sangat berguna untuk pengembangan jangka panjang dalam menangani kemiskinan dan komunitas yang marjinal.

Dalam keterkaitan modal sosial sebagai modal dasar pembangunan desa eks transmigrasi dan desa lokal, mengacu pada konsep Junaidi (2012) menjelaskan bahwa desa lokal maupun desa eks transmigrasi umumnya mempunyai modal sosial *bonding* yang tinggi akan tetapi lemah dalam membangun modal sosial *bridging* sehingga tidak menghasilkan aksi kolektif yang menguntungkan. Hal ini memicu kawasan eks transmigrasi bersifat *enclave*. Hasil penelitian Samuel Bazi *et.al.*¹³ menunjukkan proses transfer keahlian dan kemampuan oleh transmigran cenderung tidak terjadi antara desa eks transmigrasi dengan wilayah sekitarnya sehingga tidak memberikan keterkaitan dampak pada perkembangan desa lokal.

Dalam hubungannya dengan Modal Sosial, tingkat perkembangan

desa dapat diklasifikasikan dalam 3 kelas¹⁴ :

- a. Desa Swadaya (desa terbelakang) yaitu wilayah desa yang proses perkembangannya lamban karena tidak terbangunnya interaksi (*bridging*) dengan wilayah lain dan lebih mengandalkan modal sosial *bonding*.
- b. Desa Swakarya (desa sedang berkembang) dimana perkembangan desa lebih baik, tingkat kekerabatan (*bonding*) sudah berkembang ke arah interaksi (*bridging*) dengan wilayah lain.
- c. Desa Swasembada (desa maju) yaitu desa yang sudah mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Kemampuan untuk berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan wilayah lain sudah berjalan. Desa ini mampu mentransformasikan ikatan *bonding* menjadi ikatan *bridging* untuk memperoleh keuntungan.

Collier¹⁵ menjelaskan 3 (tiga) *economic outcome* dari modal sosial adalah (1) mengurangi *asymmetric information* dengan adanya aliran informasi dari kelompok yang tertinggal terhadap kelompok yang

¹² *Op Cit.*, Woolcock dan Narayan

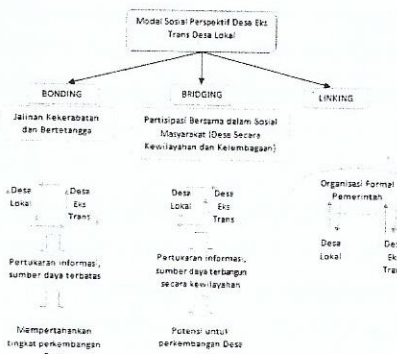
¹³ Bazi, Samuel, *et.al.* (2014). *Skill Transferability, Migration and Development : Evidence from Population Resettlement in Indonesia*. Research The Center on Emerging and Pasific Economies. San Diego. Diakses melalui [http : //sites.google.com/site/samuelbazi/research](http://sites.google.com/site/samuelbazi/research)

¹⁴ Hand Out Geografi Desa dan Kota. Universitas Pendidikan Indonesia

¹⁵ P. Collier, *Social Capital and Poverty*, Social Development Department, Washington DC, World Bank (1998)

lebih maju, (2) mengurangi perilaku *opportunistic* dimana adanya tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok dan(3) memunculkan *collective action*.

Mekanisme aliran informasi / sumber daya merupakan strategi *copying* mendorong terjadinya *sharing information*. Berdasarkan konsep teori dan mekanisme tersebut maka kerangka berfikir makalah ini dibangun sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 berikut :



Modal sosial *bonding* diduga sebagai *social support* yang berguna untuk mempertahankan *tingkat perkembangan desa (pembangunan)* sehingga desa dapat tetap berkembang. Sedangkan ikatan *bridging* diduga mempunyai pengaruh yang lebih besar untuk menginisiasi perkembangan desa karena pertukaran sumber daya (informasi, pengetahuan dan pengalaman) lebih luas melalui mekanisme *copying*.

III. PEMBAHASAN

Secara ideal, dalam tataran kewilayahan, desa mempunyai tantangan yang besar mentransformasikan ikatan *bonding* menjadi ikatan *bridging* untuk memperoleh keuntungan. Jika dilihat dari perspektif desa eks transmigrasi dan desa lokal, data dan fakta penelitian menunjukkan desa eks transmigrasi mampu berkembang secara kewilayahan dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan penduduknya (transmigran). Namun desa/kawasan eks transmigrasi yang ada cenderung tumbuh sebagai kawasan *enclave* sehingga tidak signifikan dalam memberikan kontribusi yang rendah terhadap pengembangan wilayah sekitarnya (desa lokal) dan kesejahteraan masyarakat tempatan.

Adanya perbedaan tersebut menunjukkan bahwa secara makro modal sosial yang terbangun pada desa eks trans lebih baik dibandingkan desa lokal dan tidak terbangun modal sosial *bridging* yang baik diantara 2 jenis desa ini. Untuk mengelaborasi pernyataan di atas makalah ini disusun dengan pendekatan studi kasus dan didukung dengan studi literature beberapa penelitian yang menunjukkan peranan modal sosial dalam pembangunan pedesaan.

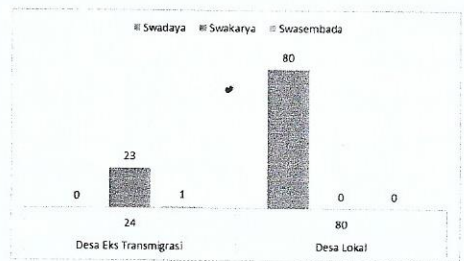
Analisis studi kasus pada tulisan ini adalah pada peranan modal sosial pada tingkatan desa lokal dan desa eks transmigrasi di Kabupaten Pelalawan. Desa eks transmigrasi dalam hal ini adalah unit-unit pemukiman transmigrasi yang telah menjadi desa definitif yang berjumlah 24 desa dan desa lokal adalah desa yang dihuni oleh masyarakat tempatan yang berjumlah 104 desa yang ada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pendekatan penulisan dilakukan melalui perbandingan tingkat perkembangan desa dan tingkat kemiskinan.

Ketimpangan Tingkat Perkembangan Desa

Kabupaten Pelalawan merupakan daerah tujuan penempatan transmigran di provinsi Riau. Pangkalan Kerinci, ibu kota Kabupaten Pelalawan, adalah salah satu dari lima kota kecil di Provinsi Riau yang tumbuh dari pemukiman transmigrasi.¹⁶

Berdasarkan data tingkat perkembangan desa Kabupaten Pelalawan, pada Gambar 2 dari jumlah 104 desa, terdapat 80 desa swadaya, 23 desa swakarya dan 1 desa

swasembada dengan perkembangan yang lebih baik. 23 desa swakarya dan 1 desa swasembada tersebut merupakan desa-desa eks transmigrasi yang berkembang dari 24 UPT yang ada yang tersebar di 6 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.¹⁷



Sumber : BPMPD Kabupaten Pelalawan, diolah (2015)

Gambar 2. Tingkat Perkembangan Desa Eks Transmigrasi dan Desa Lokal di Kabupaten Pelalawan Tahun 2015

Dalam kaitannya dengan peranan modal sosial terhadap ketimpangan tingkat perkembangan desa diatas dapat dijelaskan melalui hasil penelitian berikut:

1. Ernan Rustiadi dkk¹⁸ dalam jurnal penelitiannya pada 6 desa Eks Transmigrasi di Provinsi Jambi (2012) menunjukkan rendahnya interaksi antara desa Eks-Trans dengan desa sekitarnya (modal

¹⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kemenakertrans (2013), " Transmigrasi Hanya Ada di Indonesia."

¹⁷ Status Desa pada unit pemukiman transmigrasi di kabupaten Pelalawan terjadi pada 2 periode, ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Kampar dan sesudah Pelalawan resmi menjadi kabupaten pemekaran pada tahun 1999.

¹⁸ Rustiadi, Ernan, dkk. 2012. *Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Era Otonomi Daerah (Kajian Khusus Interaksi Pemukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya)*. Jurnal Visi Publik.

sosial bridging). Pola interaksi lebih dominan kepada sesama desa eks-transmigrasi lainnya. Hal ini disebabkan tidak terbangunnya berbagai fasilitas dan tidak tumbuhnya aktivitas produksi di desa sekitar pemukiman transmigrasi yang terkait secara fungsional (demand-supply). Hal ini juga didukung dengan buruknya jaringan transportasi dan lemahnya pengembangan modal sosial. Faktor lain adanya dukungan pemerintah pusat melalui program transmigrasi (modal sosial linking) mendorong kawasan trans menjadi lebih maju secara kelembagaan dan kewilayahan.

2. Diperkuat oleh hasil penelitian Samuel Bazi, dkk¹⁹ desa Transmigrasi di Indonesia menunjukkan proses transfer keahlian dan kemampuan oleh transmigran (modal sosial bridging) yang cenderung tidak terjadi antara desa eks transmigrasi dengan wilayah sekitarnya sehingga tidak memberikan keterkaitan dampak pada desa. Proses transfer sangat dipengaruhi oleh kesamaan daerah asal, bahasa dan budaya.

3. Hasil penelitian Puji Hartati di Pemukiman Transmigrasi di Luwu Utara Sulawesi²⁰ menunjukkan bahwa para transmigran yang berasal dari Pulau Jawa memiliki modal sosial bonding yang tinggi dibandingkan masyarakat tempatan. Modal sosial ini terbentuk dari rasa senasib sepenanggungan yang akhirnya bermuara pada mengkrystalnya norma, kerjasama (network), dan rasa saling percaya (trust) yang merupakan bagian integral dari modal sosial. Modal sosial bahkan memberikan kontribusi 13.4 % pada perkembangan desa eks transmigrasi.

Kearifan lokal dan tradisi gotong royong yang dibawa dari tempat asal tetap dipelihara sehingga hal ini makin mendorong keeratan hubungan sosial antara masyarakat transmigran. Salah seorang peneliti terkemuka tentang masyarakat pedesaan Scott *dalam* Subejo²¹ telah mengkategorikan masyarakat pedesaan Jawa sebagai salah satu dari masyarakat pedesaan di dunia yang memiliki tradisi communitarian paling kuat.

¹⁹ *Op Cit.*, Bazi, dkk

²⁰ Puji Hartati (2008). *Adaptasi Masyarakat Transmigran Dalam Lingkungan Sosial*. Jurnal Agrisistem, Desember 2008, Vol. 4 No. 2 ISSN 1858-4330 .

²¹ Subejo. (2013). *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta, hal 4

Ketimpangan Tingkat Kemiskinan

Jika dianalisis secara sederhana melalui data penduduk miskin Kabupaten Pelalawan²² secara agregat menunjukkan bahwa penduduk miskin di desa eks trans hanya sekitar 8.5 % lebih rendah dibandingkan agregat pada desa lokal yang mencapai 12 %. sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 1 berikut.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Miskin Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Desa Eks Trans dan Desa Lokal

| No | Desa | Jumlah | | |
|----|------------------|----------|-------------|---------------|
| | | Penduduk | Pddk Miskin | % Pddk Miskin |
| 1. | Eks Transmigrasi | 83.217 | 7.073 | 8,5 |
| 2. | Lokal | 261.858 | 31.575 | 12 |
| | Total | 345.075 | 38.648 | 11,2 |

Sumber : BPS Kabupaten Pelalawan (2013)

Pola dan kondisi kemiskinan berdasarkan desa eks transmigrasi dan desa lokal di Kabupaten Pelalawan di atas dapat dijelaskan melalui konsep Woolcock dan Narayan²³ yang menjelaskan bahwa peranan ikatan *bonding* dan *bridging* tidak dapat saling terpisahkan dalam melawan kemiskinan. Untuk menuntaskan kemiskinan maka rumah tangga miskin harus mempunyai kedua ikatan *bonding* dan *bridging* yang tinggi. Peranan ikatan *bonding* berguna sebagai *defence* atau *security risk*

bagi rumah tangga miskin sedangkan ikatan *bridging* bermanfaat untuk *offence* atau *get ahead* untuk mengeluarkan sepenuhnya dari garis kemiskinan.²⁴

Jika dianalisis, data dan konsep diatas menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di desa eks trans telah mampu mengedepankan ikatan *bonding* dan *bridging*, sehingga pertukaran sumber daya berupa informasi, pengetahuan dan pengalaman melalui mekanisme *copying* dapat belajar dari rumah tangga tidak miskin sehingga aliran informasi berupa pengetahuan, pengalaman atau dana yang diperoleh lebih banyak dibandingkan jika rumah tangga miskin hanya berinteraksi sesama rumah tangga miskin. Namun, jika dilihat dari sisi hubungan modal sosial *bridging* antara desa eks trans dan desa lokal, mekanisme pola interaksi lebih dominan kepada sesama desa eks-transmigrasi lainnya. Hal ini disebabkan tidak terbangunnya berbagai fasilitas dan tidak tumbuhnya aktivitas produksi di desa sekitar pemukiman transmigrasi yang terkait secara fungsional (*demand-supply*).

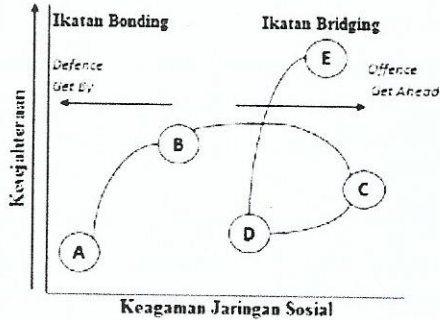
Tidak terbentuknya modal sosial *bridging* yang baik dan kuat di desa lokal akan menyebabkan rumah tangga miskin terjebak pada *bonding*

²² BPS Kabupaten Pelalawan. (2013). *Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2013*.

²³ *Op Cit.*, Woodlock dan Narayan

²⁴ Sofyan Yamin. *Pengentasan Kemiskinan di Indonesia : Modal Sosial yang terlupakan*.

trap. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.



Sumber : Woolcock dan Narayan dalam Sofyan Yamin (2014)

Gambar 3. Mekanisme Perpindahan Kemiskinan Melalui Ikatan Bonding dan Bridging

Pada kondisi A, B dan C rumah tangga miskin hanya mengandalkan modal sosial bonding dan tidak mampu atau tidak memperoleh akses terhadap informasi yang lebih luas dan beragam. Sedangkan kondisi C dan D menunjukkan bahwa ada salah satu atau beberapa anggota kelompok di desanya (terutama yang ikut program bantuan kredit) yang memiliki keseriusan yang tinggi dan komitmen serta paksaan untuk keluar dari *bonding trap*, anggota kelompok tersebut berusaha membangun jaringan (ikatan *bridging*) yang berbeda (dengan kelompok yang lebih heterogen) sehingga kesejahteraan akan meningkat dari (D) ke (E).

Perbedaan Aspek Modal Sosial Desa Eks Tran dan Desa Lokal

Agar didapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang perbedaan peranan modal sosial dalam mendorong pembangunan desa maka akan diambil perbandingan antara masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari yang merupakan salah satu desa eks transmigrasi dan masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga yang merupakan desa lokal.²⁵ Perbedaan aspek modal sosial ini akan dibahas melalui aspek sosial dan kultural, aspek ekonomi, aspek pemerintahan desa dan aspek peranan perempuan, sebagaimana dijelaskan melalui tabel 2 berikut :

Tabel 2. Perbandingan Aspek Modal Sosial Antara Masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari dan Desa Lubuk Kembang Bunga

| No. | Aspek Modal Sosial | Desa Lubuk Kembang Sari (Eks Trans) | Desa Lubuk Kembang Bunga (Lokal) |
|-----|----------------------------------|---|---|
| 1. | Sosial Kultural | | |
| | Sistem Kekerabatan | Erat dan didukung dengan adanya paguyuban dan sistem gotong royong | Erat namun kurang guyub |
| | Etos Kerja | Tinggi sehingga produktifitas lebih baik | Lebih rendah sehingga tingkat produktifitas belum berkembang |
| 2. | Ekonomi | | |
| | Akses terhadap kredit | Lebih baik dalam memanfaatkan kredit sebagai modal perluasan usaha (berkebun) | Rendah dan didukung dengan tidak terbangunnya jiwa berwirausaha |
| | Lembaga Ekonomi | Tersedia Koparasi simpan Pinjaman | Tidak tersedia |
| 3. | Pemerintahan Desa | | |
| | Penyerapan Dana ADD (tahun 2013) | Cukup tinggi (80 %) didukung dengan sistem gotong royong sehingga kegiatan pembangunan berjalan | Rendah hanya 55 % |
| | Administratif Keuangan Desa | Memiliki PAD Desa yang berasal dari kebun desa dan BUMDes | PAD sangat rendah, BUMDes belum berjalan |
| 4. | Peranan Perempuan | | |
| | Aktivitas | Ikut bekerja (berkebun) ataupun berdagang | Pada umumnya Ibu Rumah Tangga |

Sumber : Dianalisa dan diolah dari berbagai sumber data (2015)

²⁵ Desa Lubuk Kembang Sari dan Desa Lubuk Kembang Bunga merupakan desa yang berbatasan langsung yang secara administratif berada di Kecamatan Ukui dan telah berdiri ketika Kabupaten Pelalawan masih menjadi bagian Kabupaten Kampar (1990 /1991)

Pola Keterkaitan Modal Sosial Bonding Bridging dan Linking Desa Eks Trans dan Desa Lokal

Dari pendekatan kasus dan didukung dengan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya maka dapat disusun suatu pola keterkaitan modal sosial bonding bridging dan linking antara desa eks transmigrasi dan desa lokal sebagaimana ditunjukkan tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pola Keterkaitan Modal Sosial Masyarakat Desa Eks Transmigrasi dan Desa Lokal

| Desa | Modal Sosial | | |
|------------------|--|---|---|
| | Bonding | Bridging | Linking |
| Eks Transmigrasi | Telah terbangun dengan kuat dan menjadi modal dalam pembangunan desa | Telah terbangun diinternal sesama masyarakat dan terinternal antara masyarakat desa dengan masyarakat desa eks trans lainnya, namun tidak signifikan dengan masyarakat desa lokal | Keberadaan program transmigrasi membuka akses hubungan dengan organisasi formal pemerintah maupun lembaga pemberi modal menjadi lebih baik. |
| Lokal | Telah terbangun namun belum bertransformasi pada pola bridging antara sesama masyarakat desa | Pola Bridging belum terbangun dan kaitannya dengan membangun bridging dengan desa eks trans tidak optimal | Pasca otonomi, keberadaan desa lokal lebih terbuka dalam membangun linking dengan organisasi formal pemerintah |

Sumber : Dianalisa dan diolah berdasarkan data dan hasil penelitian

IV. SIMPULAN

1. Modal Sosial merupakan kunci utama dalam pembangunan desa selain kelembagaan lokal dan dinamisasi teknologi dan pendanaan. Dalam perspektif pembangunan desa berdasarkan desa eks transmigrasi dan desa lokal, desa eks transmigrasi mampu berkembang dengan lebih baik dibandingkan desa lokal dikarenakan terbangunnya

bonding modal sosial yang lebih kuat.

2. Disisi lain perkembangan wilayah desa eks trans hanya bersifat *enclave* dan tidak terbangun *bridging* dengan desa lokal sehingga terjadi ketimpangan pembangunan wilayah antara desa eks trans dan desa lokal dan ini juga disebabkan dukungan (*linking*) pemerintah pusat melalui program transmigrasi yang menyebabkan desa eks transmigrasi lebih memiliki daya saing yang lebih baik.
3. Masyarakat miskin dan menengah desa mempunyai tantangan yang besar mentransformasikan ikatan *bonding* menjadi ikatan *bridging* untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan.
4. Tidak terbangunnya mekanisme *copying* dalam pola bridging antara desa eks trans dan desa lokal merupakan bentuk *bonding trap* yang terjadi pada masyarakat miskin desa lokal perlu menjadi perhatian kebijakan pemerintah kabupaten Pelalawan maupun pemerintah pusat terutama dalam menyikapi konsep nawa cita “membangun dari desa dan pinggiran”.
5. Transformasi kawasan transmigrasi menjadi desa definitif dan menunjang pembangunan daerah menunjukkan program transmigrasi merupakan mobilitas

spasial atau migrasi penduduk horizontal yang khas Indonesia yang patut untuk tetap dilaksanakan pada era otonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Aditiasari, Dana . (2015). *Ini Tantangan Program Transmigrasi Jokowi*. Artikel Berita pada www.detikfinance.com 27 April 2015 diakses pada 21 Maret 2016.
- Andriani, L. (2013). *Social Capital: a Road Map of Theoretical Frameworks and Empirical Limitations*. Working Papers in Management, Department of Management Birkbeck University of London, ISSN 2052 – 0581.
- Augusta, Ivanovich. (2014). *Transformasi Desa Indonesia 2003-2025*. Working Paper. IPB Bogor
- Bambang Juanda dan Junaidi. (2012). *Analisis Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi*. Jurnal Paradigma Ekonomi Edisi Vol. 4 No. 2 Juli – Desember 2012.
- Bazi, Samuel, et.al. (2014). *Skill Transferability, Migration and Development : Evidence from Population Resettlement in Indonesia*. Research The Center on Emerging and Pasific Economies. San Diego. Diakses melalui <http://sites.google.com/site/samuelbazzi/research>
- BPMPD Kabupaten Pelalawan.(2015). *Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015*.
- BPS Kabupaten Pelalawan. (2013). *Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2013*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). <http://www.bps.go.id/>
- Collier, 1998, *Social Capital and Poverty*, Social Development Department, Washington DC, World Bank
- Direktorat Jendral Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.(2013). *Transmigrasi hanya ada di Indonesia*.
- Hartati, Puji. (2008). *Adaptasi Masyarakat Transmigran Dalam Lingkungan Sosial*. Jurnal Agrisistem, Desember 2008, Vol. 4 No. 2 ISSN 1858-4330 .
- Hand Out Geografi Desa dan Kota. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Putnam, Robert. D. 1993 *The Prosperous Community: Social*

Capital and Public Life, “ The American Prospect No 13 Spring

Rachbini, Didik J. (2015). *Ekonomi Kelembagaan*. INDEF. Cetakan Kedua Juli 2015.

Rustiadi, Ernan, dkk. 2012. *Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Era Otonomi Daerah (Kajian Khusus Interaksi Pemukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya)*. Jurnal Visi Publik.

Subejo. (2013). *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta

Sofyan Yamin & Teguh Dantarto. (2014). *Pengentasan Kemiskinan di Indonesia : Modal Sosial yang terlupakan*. LPEM FEUI.

Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). *Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy*. The World Bank Research Observer, vol. 15, no. 2, pp. 225–49.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa